

CAPAIAN DAN KEBERLANJUTAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN PARTISIPATIF



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN PARTISIPATIF

Millennium Challenge Account atau MCA – Indonesia menginisiasi kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) yang bertujuan mendukung perencanaan pembangunan melalui kepastian ruang dan penggunaan data dan informasi keruangan yang akurat.



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN PARTISIPATIF

Sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau, kegiatan PLUP dirancang dengan tujuan sebagai berikut :



Meletakkan unsur-unsur dasar perencanaan tata ruang dan tata guna lahan yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan investasi dalam energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang didanai oleh Fasilitas Pendanaan Kemakmuran Hijau



Memperkuat kepastian tata ruang bagi masyarakat di kabupaten yang terpilih untuk investasi Kemakmuran Hijau



Mendukung kesesuaian dengan standar-standar kinerja lingkungan, sosial dan kesetaraan gender.

LOKASI

1 Jambi

- a. Kabupaten Merangin
- b. Kabupaten Muaro Jambi
- c. Kabupaten Tebo
- d. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- e. Kabupaten Kerinci

2 Riau

- a. Kabupaten Rokan Hilir
- b. Kabupaten Rokan Hulu
- c. Kabupaten Pelalawan
- d. Kabupaten Kampar
- e. Kabupaten Kuantan Singingi

3 Sulawesi Barat

- a. Kabupaten Mamasa
- b. Kabupaten Mamuju
- c. Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kabupaten Majene

4 Nusa Tenggara Barat

- a. Kabupaten Lombok Timur
- b. Kabupaten Lombok Tengah
- c. Kabupaten Lombok Utara
- d. Kabupaten Lombok Barat
- e. Kabupaten Sumbawa Barat

5 Nusa Tenggara Timur

- a. Kabupaten Sumba Timur
- b. Kabupaten Sumba Barat
- c. Kabupaten Sumba Tengah
- d. Kabupaten Sumba Barat Daya
- e. Kabupaten Ende
- f. Kabupaten Sikka
- g. Kabupaten Flores Timur

6 Sumatera Barat

- a. Kabupaten Solok Selatan
- b. Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Kabupaten Dharmasraya

7 Sulawesi Selatan

- a. Kabupaten Luwu
- b. Kabupaten Luwuk Utara
- c. Kabupaten Luwuk Timur

8 Sulawesi Tenggara

- a. Kabupaten Kolaka
- b. Kabupaten Kolaka Utara
- c. Kabupaten Kolaka Timur

9 Kalimantan Utara

- a. Kabupaten Malinau

10 Kalimantan Timur

- a. Kabupaten Berau
- b. Kabupaten Mahakam Ulu

11 Kalimantan Barat

- a. Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Kabupaten Sintang

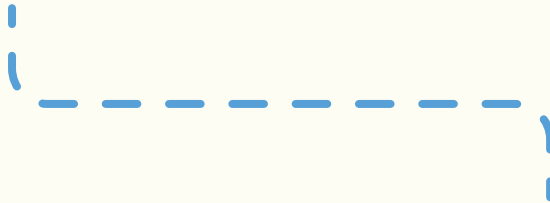


PENDEKATAN

Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga lokal untuk perencanaan pembangunan melalui kepastian ruang dan penggunaan data dan informasi keruangan yang akurat melalui empat pendekatan berikut:



Dukungan terhadap penetapan dan penegasan batas desa serta pemetaan sumberdaya desa yang akurat sebagai langkah pertama dalam perencanaan tata ruang secara partisipatif.



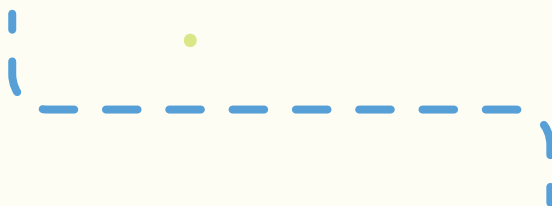
Penyediaan sistem pengumpulan data geospasial dan persiapan basis data Sistem Informasi Geospasial untuk membuat pemetaan primer dan sekunder.



PENDEKATAN



Kompilasi geo-referensi perizinan terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang sudah ada maupun yang sedang diproses.



Memperkuat rencana tata ruang kabupaten melalui peningkatan kapasitas aparat terkait perencanaan dan pengelolaan informasi penggunaan lahan berbasis data spasial



CAPAIAN



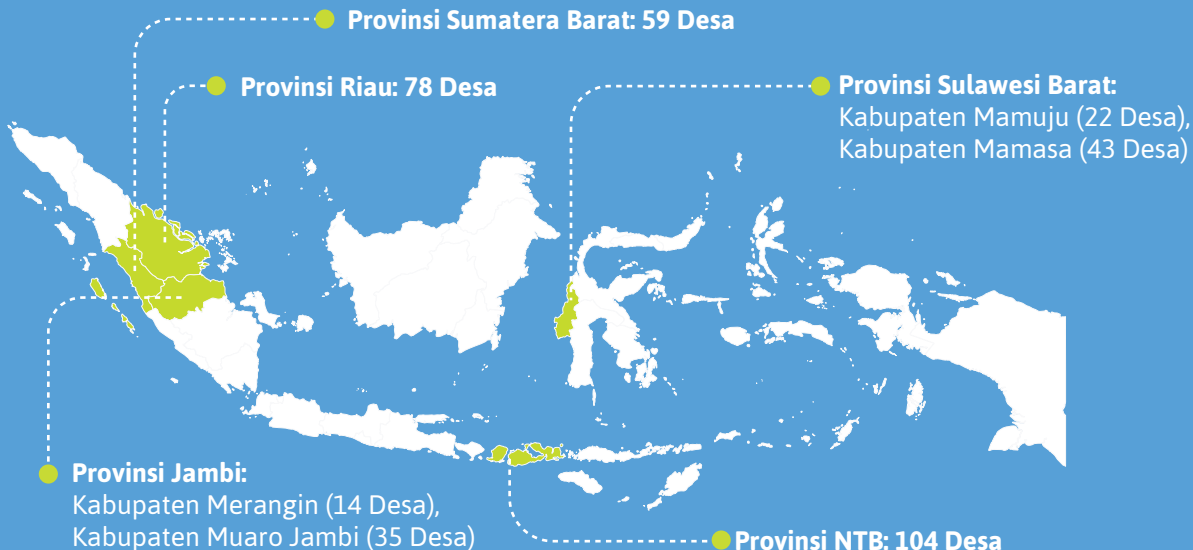
Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang merujuk pada Permendagri No. 45 Tahun 2016.



40 Kabupaten target menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif

Dukungan Penetapan dan Penegasan batas desa untuk 114 desa dari 4 Kabupaten di Sulawesi Barat dan Jambi telah didukung Peraturan Bupati:

Kegiatan serupa berlangsung di 241 desa di 13 Kabupaten di NTB, Riau dan Sumatera Barat.



CAPAIAN



Kasus-kasus sengketa lahan telah terinventarisasi. Kegiatan penetapan batas desa juga menjadi ajang mediasi bagi penyelesaian konflik batas desa.



35 Kabupaten telah memiliki kompilasi data geospasial terkait tutupan lahan dan penggunaan lahan serta geo-referensi perizinan terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam



Lebih dari 2.400 staf Pemerintah Kabupaten telah mengikuti pengembangan kapasitas perencanaan dan pengelolaan informasi tata guna lahan berbasis data spasial serta penggunaannya dalam perencanaan tata ruang.

HARAPAN DAN KEBERLANJUTAN



Diperlukan metodologi yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan kegiatan penataan batas desa.



Tersedianya Peta Rupa Bumi Indonesia skala besar : 1:5000, 1: 2.500 atau 1: 1000 untuk dasar pembuatan peta desa.



Peningkatan pemahaman para pemangku kebijakan/ kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan satu data daerah guna mendukung proses penataan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan



Penguatan kelembagaan pengelolaan satu data daerah melalui pemufakatan mekanisme pengelolaan data-data geospasial dan yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.



Penyiapan instrumen kebijakan daerah guna mendukung keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam pengelolaan satu data daerah dan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta



Millenium Challenge Account Indonesia

Reducing Poverty Through Economic Growth

Gedung MR 21 (Gedung Jasindo)
Jl. Menteng Raya 21, Jakarta Pusat 10340 Indonesia

